

ALIRAN “BERMASALAH” DALAM LANSKAP NALAR PUBLIK: Respon Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Aliran Bermasalah

The Problematical Sect in the Viewpoints of Public Reason The Responses of Samarinda People toward the Problematical Sect

Muhammad Rais

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl.MH.Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Email: muh_Rais71@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 18 Oktober 2012. Naskah direvisi tanggal 7 Nopember 2012. Naskah disetujui tanggal 14 Desember 2012

Abstrak

Penelitian dengan genre kebijakan ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan respon publik terhadap aliran keagamaan yang ditengarai, bahkan sebagian telah divonis, sebagai sempalan dan sesat. Salah satu alibi yang dijadikan sebagai pijakan argumentasi (illat hukm) keluarnya regulasi terkait penanganan mereka adalah reaksi, dan resistensi masyarakat yang potensial mengganggu stabilitas sosial. Dengan memanfaatkan metode survey, melalui instrumen utama berupa 100 kuesioner dalam proses penjarangan data primer, ditemukan respon publik yang mengindikasikan respon evaluative yang cenderung masif negatif terkait keberadaan aliran bermasalah. Secara kognitif, responden dominan tahu tentang eksistensi aliran sempalan di Indonesia, bahkan yang eksis di lingkungannya sendiri, mereka juga sepakat divonis sesat. Namun mekanisme penanganan yang tepat, kalangan responden lebih memilih jalur hukum, termasuk setuju dengan regulasi yang dibuat pemerintah, dalam konteks Kota Samarinda, pembekuan aktivitas Ahmadiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi MUI setempat, paralel dengan respon dan aspirasi publik. Dengan demikian, nalar elite bersesuaian dengan nalar publik.

Kata Kunci: respon publik, aliran bermasalah, Ahmadiyah

Abstract

The policy research genre aimed at measuring and describing the public's responses toward the religious sect which was suspected and even sentenced to be deviant. One of the alibis used as the basic argument of establishing regulations about handling them was the people's reaction or resistance which was potentially disrupted the social stability. By employing the survey method through the main instrument which consisted of 100 questionnaires for the process of obtaining primary data, it was found that the public's responses indicating evaluative responses which tended to be massively negative related to the presence of the problematical sect. Cognitively, the respondents dominantly knew about the existence of deviant sects in Indonesia, even the existed one in their own environment was directly sentenced to be deviant. However, among respondents preferred legal law as the appropriate handling mechanism, in which they agreed with the regulations decided by the local government, Samarinda. The deactivation of Ahmadiyah activities was established by the decree of Mayor based on the recommendation of local Majelis Ulama Indonesia which was in line with the responses and aspirations of public. Thus, the elite reason was consistent with the public reason.

Keywords: the public's responses, the problematical sect, Ahmadiyah, Samarinda

PENDAHULUAN

Penelitian dengan genre riset kebijakan ini merupakan upaya mendeskripsikan fenomena yang mengejawahtah di *grass root* terkait dengan relasi antar aliran dan atau kelompok keagamaan, terutama yang mengemuka dalam spektrum Islam ortodoks yang lebih familiar dengan istilah *mainstream* dengan Islam heterodoks yang divonis oleh beberapa institusi, yang menggunakan legitimasi negara sebagai menyimpang dari Islam arus utama. Kelompok yang menyimpang dari Islam arus utama, secara sarkastik diistilahkan Gus Dur sebagai gerakan sempalan sebagai terjemahan dari terma *splinter group*.

Polarisasi beberapa aliran, sekte, dan kelompok keagamaan, khususnya diinternal umat Islam yang disekat berdasarkan pijakan interpretasi ajaran Islam yang bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pembeda, meliputi: latar belakang pendidikan, alokasi waktu mendampingi nabi yang berimplikasi pada tingkat penyerapan informasi darinya, dan bahkan ditengarai pula sarat dengan rivalitas berbasis etnisitas. Skisme dalam Islam bahkan menjadi penanda dan batu pijakan alur sejarah dan mozaik peradaban Islam sepeninggal nabi dan berkelanjutan hingga kini. Embrio skisme, pergulatan antarortodoksi dan heterodoksi dalam Islam, bahkan lebih awal mengemuka, terutama konstelasi politik yang memanas di kalangan sahabat, terkait pengganti nabi sebagai pemimpin politik. Ironisnya, pemakaman nabi sempat tertunda disebabkan perdebatan politik praktis tersebut yang alot dan banyak menyita waktu.

Dalam konteks relasi antaraliran, kelompok dan atau sekte keagamaan di Indonesia, alur sejarah tampaknya memiliki labirin yang hampir sama, di mana perbedaan kerap kali dirayakan sebagai pertentangan, kultur masyarakat Indonesia kini lebih diperparah karena konstruksi sosial masih dalam gestur “tubuh” sosial orde baru yang memaknai persatuan sebagaimana layaknya persatuan, masyarakat disatukan, tapi tidak berbaur. Polarisasi yang oposisi *binary* tersebut, berimplikasi pada relasi antara kelompok arus utama dengan kelompok yang menyempal dari induknya yang acap kali dipotret melalui perspektif pertentangan yang salah satunya meniscayakan peniadaan, dan melainkan yang lain, walaupun hanya disekat persoalan *furu'iyah*.

Masih mengerasnya relasi antar kelompok keagamaan secara *binary opposition*, tampak pada reaksi dan respon beberapa kalangan elit agama terhadap kemunculan aliran yang menyempal,

sebut saja misalnya: Ahmadiyah, Syiah, LDII, dan lain-lain. Reaksi tersebut direspon dengan beberapa mekanisme, mulai dari persuasif, tindakan *coersion*, sampai persekusi. Salah satu alibi yang acapkali digunakan sebagai basis argumentasi (*illat hukm*) ditetapkannya regulasi terkait penanganan aliran-aliran tersebut adalah adanya reaksi, resistensi, dan protes dari publik yang menolak keberadaan mereka dengan beragam alasan, tindakan preventif sebagai solusi konstruktif dalam upaya menghindari instabilitas di ranah publik. Penelitian ini menemukan signifikansinya sebagai upaya mengukur dan mendeskripsikan respon publik terkait eksistensi aliran, kelompok dan atau sekte tersebut.

Mengacu pada deskripsi problem relasi antar aliran dan atau kelompok yang kerap kali sarat dengan masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana respon publik Kota Samarinda terhadap aliran keagamaan bermasalah?. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan respon evaluatif publik Kota Samarinda terkait eksistensi dan aktivitas keagamaan beberapa kelompok dan aliran keagamaan yang cenderung dipermasalahkan oleh elite dan institusi yang otoritatif.

Tinjauan Pustaka *Respon Publik*

Respon mengejawahtah pada dua domain psikologis, yaitu persepsi atau perspektif sebagai respon dan reaksi pada tataran kognitif, sementara sikap merupakan respon aktual yang bersifat evaluatif, sebagai seperangkat mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku terhadap manusia atau sesuatu yang sedang dihadapi. Pandangan dan perasaan tersebut terpengaruh oleh ingatan akan masa lalu, oleh apa yang diketahui (Azwar, 2009: 2). Persepsi sebagai respon evaluatif kognitif, menurut artikulasi Immanuel Kant lebih dari sekedar penglihatan. Persepsi manusia tidak saja berasal dari bukti yang diperoleh dari indera, namun juga dari aparat mental yang berfungsi untuk mengorganisir rangsangan inderawi yang datang.

Dengan demikian, persepsi keagamaan menurut Nur Syam merupakan suatu proses yang aktif dalam diri seseorang yang meliputi sikap, motivasi, dan pengalaman seseorang terhadap ajaran agama (Syam, 1991: 151). Menurut Renald Kasali, bahwa stimulus yang masuk akan dicocokkan dengan rekaman yang ada untuk memberi interpretasi. Interpretasi inilah yang

melahirkan pendirian seseorang. Pendirian adalah apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang (*what the individual feels*), acap kali disebut *latent opinion* sebagai sikap yang merupakan opini tersembunyi di dalam batin seseorang (Kasali, 1994: 24).

Walaupun Charon (dalam Mulyana, 2008:7) secara berbeda memahami perspektif tidak sepenuhnya sama dengan persepsi, melainkan pemandu persepsi kita; perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat. Perspektif adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat. Becker memaknai perspektif sebagai seperangkat gagasan yang mendeskripsikan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan; suatu spesifikasi jenis-jenis tindakan yang secara layak dan rasional dilakukan orang; standar nilai yang memungkinkan orang dapat dinilai (Kriyantono, 2008:48). Perspektif tercipta berdasarkan proses komunikasi antaranggota suatu kelompok selama seseorang menjadi bagian kelompok tersebut. Dengan demikian, seseorang memiliki perspektif tertentu, jika ia hidup dan berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas tersebut. Menurut Solso bahwa kognisi, persepsi atau perspektif merupakan proses-proses dasar psikologis manusia yang mengacu pada sebuah proses berpikir yang meliputi mekanisme perolehan informasi, pengalaman, kemudian menyimpannya dalam otak, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah, berpikir, dan memformulasi bahasa (dalam Dayakisni, 2008:95). Kognisi adalah merupakan proses berpikir manusia mulai dari pencarian (*seeking*), penerimaan (*sensation*), pemaknaan (*perception*), penyimpanan (*storing*), hingga penggunaan informasi (*using*). Deretan definisi tersebut memantapkan bahwa respon sebagai bagian dari wilayah dan proses kognitif, sebuah proses serta mekanisme interpretasi atas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Proses terbentuknya respon atau persepsi yang dikemukakan Kasali, menemukan dukungan dari Dayakisni yang menekankan peranan stimulus (dorongan) yang sangat melimpah di dalam lingkungan sosial individu, yang ditangkap lalu diserap oleh indera manusia. Tetapi disebabkan segala keterbatasan kapasitas dan kemampuan indera, maka sarana kognitif manusia melakukan proses seleksi stimulus, yaitu stimulus yang memberi kesan kuat dan mendalam, termasuk yang sangat dibutuhkan yang disimpan untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan kondisi dan momentumnya.

Jika persepsi sebagaimana dijabarkan di atas, sebagai respon dan reaksi kognitif, maka sikap merupakan respon evaluatif yang berada

pada domain aktual. Sebagaimana konstataasi Rensist Likert dan Charles Osgood, bahwa sikap merupakan format evaluatif atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut. Dan secara spesifik dimaknai Louis Thurstone sebagai derajat afeksi positif atau afeksi negatif terhadap suatu obyek psikologis, bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghidupi adanya respon. Mazhab lainnya, yang berorientasi pada *triadic scheme*, memformulasikan konsep sikap sebagai konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang simbiosis mutualistis dalam memahami (*verstehen*), merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek (Samovar, 2010:222).

Aliran Bermasalah dalam Lanskap Nalar Elite dan Nalar Massa

Literatur sosiologi yang membahas tentang orang dan atau aliran bermasalah secara semantik dimaknai sebagai deviant behavior, setiap perilaku dan tindakan menyimpang dari norma yang menjadi patokan baku dalam suatu kebudayaan dan masyarakat (Cohen, 1992: 218). Istilah lain untuk menunjuk aliran bermasalah dalam konteks keagamaan lebih banyak menggunakan istilah splinter group, yang diterjemahkan Abdurrahman Wahid sebagai aliran sempalan. Istilah ini kemudian digunakan Martin van Bruinessen ketika melakukan penelitian mengenai gerakan sempalan di Indonesia (Bruinessen, 2004:206-208).

Martin lalu mendefinisikan gerakan sempalan dengan mengacu pada ortodoksi dan heterodoksi, dimana ortodoksi disejajarkan dengan umat Islam arus utama (*mainstream*), sehingga gerakan yang menyimpang dari kemapanan ortodoksi dianggap sempalan, ortodoksi yang mapan dalam konteks konfigurasi afiliasi ajaran dan organisasi dalam konteks Indonesia didominasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Walaupun dalam paradigma sosiologis, ortodoksi dan sempalan-heterodoksi sifatnya dinamis. Mengacu pada definisi ini, Martin kemudian mengidentifikasi beberapa aliran sempalan yang telah dilarang Majelis Ulama, terdiri dari: Islam Jamaah, Ahmadiyah, DI/TII, Syiah, Bahai, Unkarus Sunnah, dan lain-lain.

Mengacu pada beberapa tesis dan teori yang mengkonstruksi respon atau opini publik, maka yang dimaksud dengan konsep respon dalam penelitian ini adalah respon evaluatif terkait eksistensi aliran

keagamaan bermasalah. Terdapat tiga dimensi yang menjadi variabel dalam mengukur respon tersebut, terdiri dari komponen kognitif, psikomotorik, dan afeksi atau konatif. Kemudian *breakdown* kedalam 29 parameter atau indikator untuk menilai tingkat respon yang tergradasi dalam interval kelas, respon sangat positif, respon positif, sebagai parameter tingkat inklusifitas responden, respon sangat negatif, dan respon negatif sebagai parameter tingkat eksklusivitas kalangan responden.

Penelitian kebijakan dengan memanfaatkan metode survey dalam kerangka mengukur respon publik terhadap eksistensi dan aktivitas keagamaan beberapa Aliran bermasalah di Kota Samarinda, penjarangan data memanfaatkan 100 kuesioner, melalui pengambilan sampel secara *quota sampling* (basis argumentasi pemilihan non-probability dengan memanfaatkan *quota sampling*, adalah terkait dengan ketiadaan kerangka sampel yang tersedia di lokasi penelitian) dengan menjaring 100 responden yang terkonsentrasi di Kelurahan Karang Asem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang. Data yang terjaring melalui kuesioner dielaborasi hasil wawancara dengan beberapa informan dan dokumen yang di-

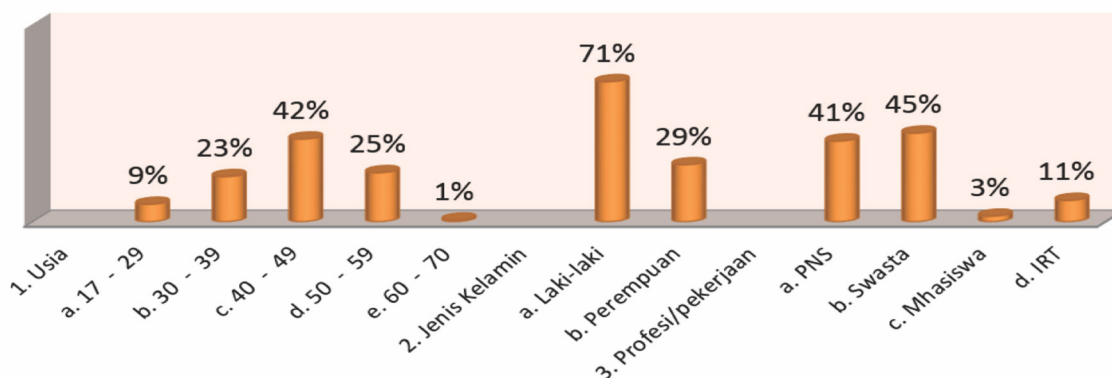
up date beberapa institusi. Data dianalisis secara kuantitatif, dalam format distribusi frekwensi, dan presentasi (display) data menggunakan grafik.

PEMBAHASAN

Identitas Responden

Hasil survey dan penjarangan sampel secara random pada lokasi penelitian yang mengambil setting di RT 27 dan 28, kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan kerangka sampling yang *ter-up date* terkait konfigurasi populasi pada kedua RT diatas, maka dengan metode penarikan sampel secara sederhana, terpilih sebanyak 100 responden yang terdiri dari 100 kepala keluarga. Setelah melalui penyortiran dan coding 100 kuesioner yang didistribusikan seluruhnya layak untuk dianalisis lebih lanjut. Agregat responden tersebut terklasifikasi berdasarkan beberapa penanda identitas, meliputi: usia, jenis kelamin, profesi, pendidikan, *income* pendapatan dan afiliasi pada ormas keagamaan. Deskripsi lengkap tampak pada grafik berikut:

Grafik1. Identitas Responden

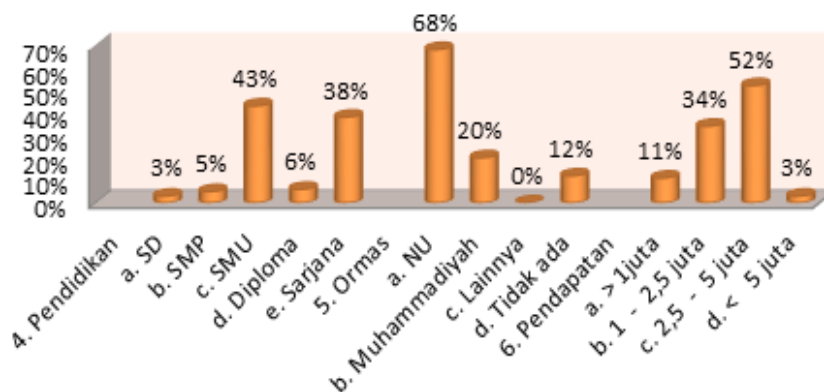


Mengacu pada grafik di atas, terdeskripsikan identitas responden yang memberikan respon terhadap 29 stimulan pertanyaan yang menjadi indikator setelah di-*breakdown* dari tiga variabel penelitian, meliputi: komponen kognitif, komponen psikomotorik, dan komponen afeksi atau konatif, dalam kerangka mengidentifikasi dan mengukur respon evaluatif, berdasarkan pengetahuan, persetujuan afirmatif dan dukungan responden pada obyek penelitian.

Responden yang terpilih terdiri dari laki-laki 71 persen dan perempuan 29 persen, yang terklasifikasi berdasarkan usia, didominasi usia 40

sampai 59 dengan agregat 42 persen, dan usia 50 sampai 59 agregat 25 persen, dan responden dengan kelompok usia lansia, 60 sampai 70 tahun, agregat 1 persen. Sementara responden terpolarisasi berdasarkan profesi didominasi responden yang bergerak di dunia swasta, agregat 45 persen hal ini menggambarkan paralelisme dengan kondisi riil bahwa dominan mereka bekerja di perusahaan pertambangan dan kontraktor. Usia dan profesi yang digeluti kalangan responden tergolong mapan, baik pada aspek pemikiran maupun sosial-ekonomi mengindikasikan tingkat reliabilitas informasi yang di-*share* dalam instrumen kuesioner.

Grafik. 2. Identitas Responden

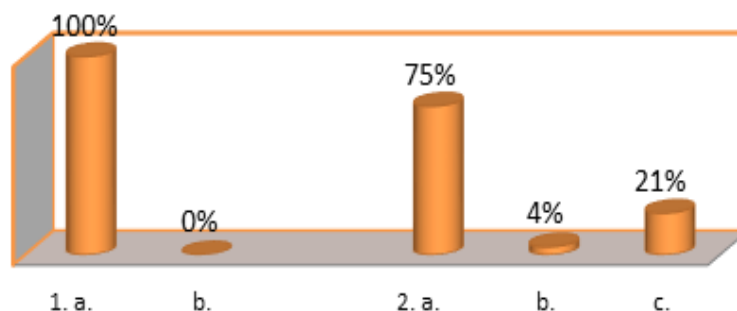


Penanda identitas responden pada domain pendidikan, pendapatan dan afiliasi terhadap ormas keagamaan, mengindikasikan tingkat kemampuan intelektual sebagaimana terdeskripsi pada grafik pertama di atas, dimana pada grafik kedua tampak indikasi kemampuan tersebut, misalnya pada variabel pendidikan responden yang didominasi jebolan pendidikan tingkat menengah atas (SMU), agregat 43 persen, dan sarjana 38 persen dan ditemukan beberapa responden yang bergelar strata dua, secara elaboratif dipertegas lagi dengan income pendapatan yang rata-rata tinggi, tengok misalnya

responden yang mendapatkan *income* 2,5 hingga 5 juta, agregat 34 persen, dan melampaui lima juta per bulan 3 persen responden. Kemudian, terkait dengan afiliasi kalangan responden pada organisasi keagamaan, cenderung merepresentasikan komposisi dan konfigurasi masyarakat secara nasional terhadap dua ormas keagamaan yang terbesar di Indonesia, yaitu 68 persen responden mengaku Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah 20 persen diklaim sebagai tempat responden berafiliasi secara organisasi dan kultural, selebihnya, 12 persen responden tidak menentukan pilihan afiliasif.

Grafik. 3. Indikator respon kognitif (pengatahuan) responden

1. Peng. eksistensi aliran sempalan di Ind dan di Lingkungannya

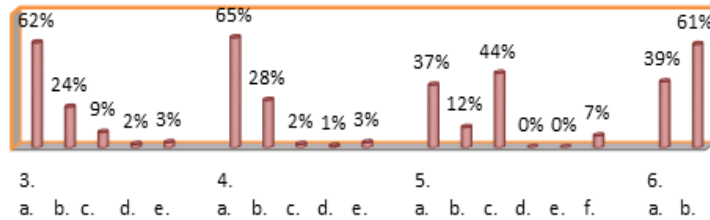


Dalam kerangka pengukuran respon evaluatif publik terhadap eksistensi dan aktivitas sosial-keagamaan yang ditengarai-sebagian telah divonis dengan perangkat fatwa MUI-Kota Samarinda telah di-*breakdown* sebanyak 29 indikator dari tiga variabel-komponen-respon, baik respon pada domain kognitif, psikomotorik, maupun afeksi. Respon kognitif kalangan responden relevansinya dengan indikator pertama mengindikasikan kecenderungan responden yang mayoritas mutlak, 100 persen, mengetahui secara kognitif terkait

eksistensi aliran dalam Islam yang dianggap sesat di Indonesia. Indikator pertama tersebut secara konsisten didukung dengan pengetahuan responden mengenai keberadaan aliran bermasalah yang eksis di sekitar kediaman mereka dengan *respon rate* mencapai 75 persen, 21 persen mengaku tidak mendapat informasi dan 4 persen mengaku tidak tahu. Reliabilitas dan validitas respon terkait dengan dua indikator ini paralel dengan indikator berikutnya, selengkapnyanya terdeskripsi dalam grafik berikut:

Grafik. 4. Respon kognitif kalangan responden

3. institusi yang menvonis sesat, 4. sumber informasi, 5. alasan penyesatan, 6. peng. dasar keyakinan



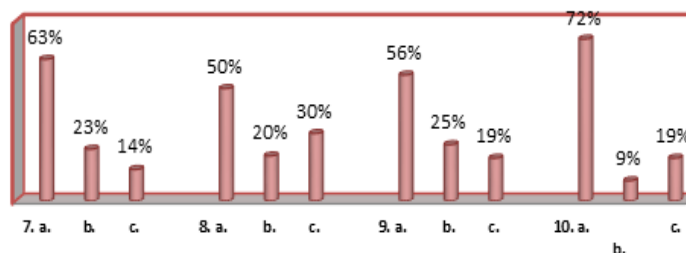
Paralel dengan indikator sebelumnya, ranah kognitif responden memuat juga informasi tentang eksistensi aliran bermasalah justru langsung dari pengamatan mereka, yaitu eksistensi salah satu aliran tersebut, yaitu aliran Ahmadiyah *respon rate* untuk indikator ini mencapai 90 persen, Bahai 1 persen, dan sisanya-tidak menjawab, 9 persen. Tingkat respon yang sangat signifikan ini dielaborasi oleh keberadaan sekretariat dan masjid sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan jamaah Ahmadiyah yang berada diperumahan Bumi Indah Permai, satu kompleks dengan kalangan responden, bahkan peristiwa penyegelan masjid milik Ahmadiyah pun, mereka mengetahui secara akurat. Responden yang selama bertahun-tahun berinteraksi dengan jamaah Ahmadiyah, mengendus kesesatan mereka melalui beberapa institusi, meliputi Majelis Ulama Kota Samarinda diketahui respon dengan agregat 62 persen, disamping MUI, terdapat 24 persen respon yang menyatakan bahwa Kementerian Agama yang menetapkan mereka sebagai aliran sesat atau bermasalah.

Respon rate terkait indikator keempat menyangkut sumber informasi mengenai vonis atau fatwa-kesesatan aliran bermasalah tersebut, dominan responden memperoleh informasi melalui media massa dengan agregat 65 persen, selain media massa, terdapat 28 persen responden mendapatkan informasi melalui tokoh agama di Kota Samarinda.

Alibi yang digunakan sebagai illat hukum fatwa penyesatan, secara variatif dikenali respon, dan alibi perbedaan pemikiran keagamaan yang dominan dipilih responden, dengan agregat 44 persen, alibi perbedaan akidah 37 persen, dan 12 persen sesat karena tata cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam *mainstream*. Tampaknya pilihan terhadap alibi yang dijadikan sebagai *illat hukum* fatwa sesat, tidak berbanding lurus dengan pengetahuan responden tentang dasar-dasar keyakinan aliran bermasalah, terbukti bahwa hanya 39 persen yang mengklaim tahu, dan lebih dari separuh yang tidak familiar dengan ajaran-ajaran yang menjadi pegangan aliran bermasalah ini

Grafik. 5. Respon psikomotorik Responden

7. persetujuan vonis sesat, 8. membahayakan aqidah, 9 ganggu kenyamanan hidup



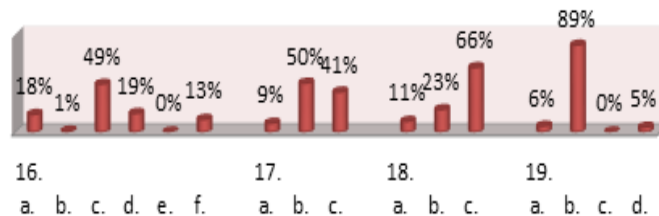
Menyangkut vonis sesat aliran keagamaan yang bermasalah yang teridentifikasi sebelumnya, mengejawantahkan titik temu antara nalar elite dengan nalar publik yang direspon secara positif, melalui persetujuan kalangan responden akan kesesatan mereka, dengan agregat respon 63 persen, dan kurang setuju 23 persen, sementara yang menolak mereka divonis sesat sebanyak

14 responden. Konvensi akan kesesatan aliran bermasalah mengalami resistensi dengan alibi akan membahayakan keyakinan, direspon separuh responden, dan selebihnya kurang setuju dan bahkan 30 persen merasa tidak khawatir, dan alibi akan mengganggu kenyamanan publik sebagaimana terjawantah pada indikator kesembilan relatif linear dengan indikator kedelapan, yang menduga

akan mengganggu kenyamanan diami responden dengan agregat 56 persen, kurang sepakat jika ditengarai akan meresahkan masyarakat dengan *respon rate* 25 persen, dan 19 bahkan tidak setuju

dengan bangunan argumentasi yang dikonstruksi tersebut. Terkait dengan perlunya kewaspadaan publik, direspon dengan sangat signifikan dengan agregat 72 persen.

Grafik. 6. Persetujuan untuk interaksi sosial
16. pemicu kekerasan, 17, setuju dengan ormas yang menyerang, 18, sedia ikut serang, 19. solusi konstruktif



Respon negatif kalangan respon terhadap aliran bermasalah, sebagaimana terdeskripsi dalam indikator-indikator di atas, yang menggambarkan respon evaluatif pada ranah kognitif, tampak kongruen-sebagai indikator konsistensi respon-dengan ranah afeksi, dominan responden, 48 persen resisten untuk bertetangga, dan 38 persen kurang setuju, sementara yang terbuka untuk bertetangga hanya 14 persen. Jika ditelisik lebih dalam, dominan responden, 56 persen menolak untuk menghadiri hajatan aliran bermasalah tersebut. Termasuk kesediaan untuk menjalin ikatan pernikahan yang direspon secara negatif-menolak menikah-sebanyak 73 responden.

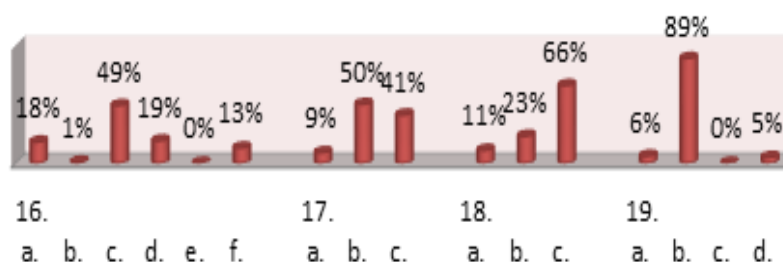
Mengenai pola penyikapan beberapa orang atau kelompok yang memilih jalan kekerasan atau penyerangan terhadap aliran bermasalah itu, terdapat 41 responden yang menolak, 45 persen yang menyatakan kurang setuju dan ironisnya terdapat 14 persen yang menyetujui aksi penyerangan sebagai solusi.

Penanganan melalui jalur hukum, mayoritas dipilih responden sebagai solusi konstruktif, hal ini

terjawantah melalui *respon rate* dengan agregat 83 persen yang setuju dengan dikeluarkannya regulasi pemerintah, dalam konteks Ahmadiyah, Walikota Samarinda telah mengeluarkan surat keputusan berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Kota Samarinda yang menginstruksikan pembekuan semua aktivitas keagamaan jamaah Ahmadiyah, sebagai tindakan preventif pemerintah kota, agar kasus kekerasan yang terjadi di beberapa kota tidak beresonansi ke Kota Samarinda.

Kasus kekerasan yang terjadi di Bogor dan Banten terhadap jamaah Ahmadiyah diketahui responden melalui media massa, modus operandi kekerasan tersebut ditemukenali responden secara berbeda, dan penyebab atau pemicu kekerasan yang eskalatif tersebut disebabkan oleh penegakan supremasi hukum yang lemah, dimensi hukum yang lemah ini direspon 49 persen responden, 19 persen menganggap bahwa aliran bermasalah tersebut memang salah dan perlu diluruskan, 18 persen menduga bahwa kasus kekerasan disebabkan satu kelompok melakukan klaim kebenaran sendiri, dan 13 persen tidak tahu.

Grafik. 7. Pengetahuan terkait pemicu reaksi dan resistensi
16. pemicu kekerasan, 17, setuju dengan ormas yang menyerang, 18, sedia ikut serang, 19. solusi konstruktif



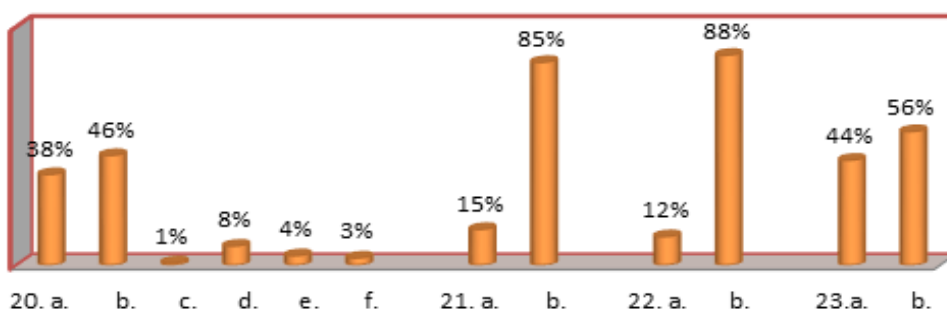
Kasus kekerasan yang terjadi di Bogor dan Banten terhadap jamaah Ahmadiyah diketahui responden melalui media massa, modus operandi kekerasan tersebut ditemukan oleh responden secara berbeda, dan penyebab atau pemicu kekerasan yang eskalatif tersebut disebabkan oleh penegakan supremasi hukum yang lemah, dimensi hukum yang lemah ini direspon 49 persen responden, 19 persen menganggap bahwa aliran bermasalah tersebut memang salah dan perlu diluruskan, 18 persen menduga bahwa kasus kekerasan disebabkan satu kelompok melakukan klaim kebenaran sendiri, dan 13 persen tidak tahu.

Secara afektif, mayoritas responden menolak untuk ikut berpartisipasi melakukan aksi penyerangan, tampak pada respon rate 66 persen, kurang bersedia 23 persen, dan 11 persen yang bersedia ikut melakukan aksi penyerangan, sebenarnya angka 11 persen masih mengkhawatirkan jika ada yang mempropokasi. Respon positif berupa penolakan ikut terlibat aksi kekerasan, ini mengafirmasi fakta bahwa orang dan atau kelompok yang melakukan kekerasan simbolik terhadap jamaah Ahmadiyah sebenarnya adalah kelompok FPI, agitas ini dilakukan beberapa kali, hingga keluar SK Walikota, walaupun terdapat 11 persen responden yang memilih jalan kekerasan,

kemungkinan itu dilakukan sebab salah seorang tokoh masyarakat di lokasi penelitian justru berafiliasi dengan forum pembela Islam tersebut, yang menurut salah seorang informan tokoh masyarakat tersebut acapkali memprovokasi warga untuk menyerang.

Melibatkan responden dalam mencari pola penanganan yang konstruktif, relatif dominan masih konsisten dengan indikator sebelumnya, yang memprioritaskan penanganannya melalui pihak yang berwajib atau pemerintah dengan agregat respon 89 persen. Bahkan terdapat responden NH (56 Tahun), yang mengemukakan bahwa di samping penanganan yang idealnya ditangani langsung pemerintah sebagai representasi negara, sebenarnya Indonesia memiliki mekanisme kultural dalam menghadapi warga negara yang cenderung pada *truth claim*, yaitu revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Dan menghadapi kasus seperti ini kita memiliki sejarah panjang sejak masa orde lama, pertentangan antara kelompok Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara, dan dipihak lain, kalangan nasionalis resisten, sehingga muncul kelompok moderat, seperti kiyai NU yang memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara sudah final (Wawancara di Samarinda, 7/10/2012).

Grafik. 8. Penyikapan responden terkait mekanisme penanganan
20. cara penyikapan terbaik, 21. kenal pimpinan, 23. tahu lokasi

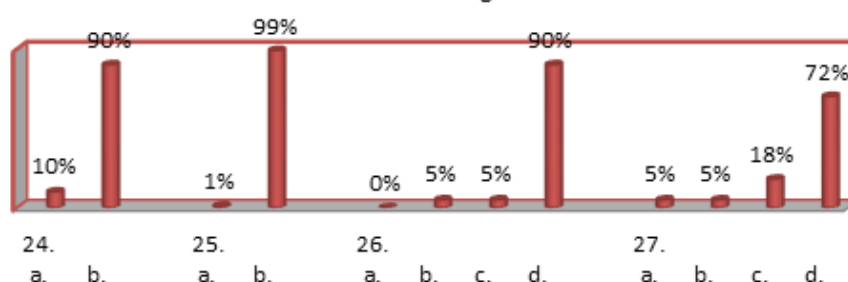


Indikator kedua puluh menyangkut mekanisme penyikapan yang paling baik terkait kehadiran aliran bermasalah, korelatif dengan indikator sebelumnya. Kalangan responden memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dengan respon rate 38 persen, dan responden yang lebih mempercayakan penanganannya pada tokoh agama sebanyak 46 responden, walaupun tidak bisa dinafikan 1 persen responden yang memilih mengusir jamaah aliran bermasalah tersebut. SK Walikota yang berisi instruksi pembekuan aktivitas

jamaah Ahmadiyah mendapat pembenaran melalui 84 persen responden.

Pengetahuan kognitif responden tentang keberadaan pimpinan aliran bermasalah ternyata lebih banyak yang tidak mengenal, sebanyak 88 persen yang mengaku tidak mengenal pimpinan aliran sempalan itu, baik pimpinan Ahmadiyah maupun Bahai, dan yang mengenal hanya 15 persen. Dari 15 persen yang mengenal hanya 12 persen yang bergaul baik dengan pimpinan aliran tersebut.

Grafik. 9: Kesiediaan membangun relasi sosial-keagamaan
 24. berdiskusi, 25. keluarga yang berafiliasi, 26. hadir acara agama, 27,
 hadir undangan



Sementara responden yang mengaku pernah melakukan diskusi dengan pimpinan aliran bermasalah di Kota Samarinda hanya 10 persen. Sedangkan responden yang mengklaim memiliki keluarga yang berafiliasi dengan aliran bermasalah-menjadi jamaah Ahmadiyah-hanya 1 persen.

Adapun responden yang secara afeksi melakukan interaksi sosial, bahkan menghadiri acara keagamaan yang dilaksanakan aliran bermasalah tersebut, 90 persen menyatakan tidak pernah, 5 persen kadang-kadang, dan 5 persen pernah sekali. Sebaliknya, terdapat 5 persen respon yang mengaku sering dikunjungi anggota aliran bermasalah tersebut dalam acara keluarga karena diundang, 5 persen responden menyatakan kadang-kadang, 18 persen pernah sekali dihadiri undangannya, dan dominan responden, 72 persen tidak pernah. Interaksi sosial melalui kerjasama sosial ekonomi sebagai indikator 28 antara umat Islam *mainstream* dengan aliran bermasalah, responnya hampir sama dengan indikator sebelumnya, respon rate 77 persen menyatakan tidak pernah, dan 21 persen mengaku kadang-kadang melakukan kerjasama tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan analisis terhadap respon evaluatif kalangan responden terhadap beberapa variabel yang dijadikan stimulus, relevansinya dengan eksistensi dan aktivitas keagamaan aliran bermasalah di Kota Samarinda, terdapat benang merah yang dapat dikonstruksi bahwa secara kognitif, keberadaan aliran bermasalah sangat familiar di kalangan responden, dengan *respon rate* 100 persen, informasi terkait eksistensi mereka diperoleh melalui media massa, ini membuktikan bahwa reaksi masyarakat Kota Samarinda yang memicu munculnya SK Walikota terkait pembekuan aktivitas sosial-keagamaan salah satu aliran bermasalah, lebih dominan dipengaruhi faktor eksternal-terutama konstruksi

dan pembungkaman media massa- yang memicu reaksi dan resistensi.

Secara afektif, pengetahuan responden yang sangat positif tidak linear keinginan responden menjalin relasi sosial-ekonomi, hal ini ditandai perilaku resistensi mereka untuk bertetangga, menjalin ikatan pernikahan, bahkan untuk sekadar bekerjasama pada aspek sosial-ekonomi sekalipun. Pilihan solutif yang dianggap konstruktif dalam kerangka penanganan aliran bermasalah, lebih mengedepankan jalur hukum, dominan responden menyayangkan mekanisme kekerasan yang kerap kali dipilih beberapa ormas keagamaan. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa tingkat respon yang ingin melakukan aksi kekerasan masih relatif tinggi dengan agregat 10-11 persen.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Balai Litbang Agama Makassar pada 2012. Peneliti mengucapkan terima kasih redaksi Jurnal Al-Qalam Balai Litbang Agama Makassar yang bersedia menerbitkan tulisan ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para informan di lapangan yang membantu peneliti hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin 1999. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik, *Kota Samarinda Dalam Angka 2011*
- Bruinessen, Martin van, 2004. *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Gerakan Sosial Budaya*, dalam Asep Gunawan (ed) *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (terj), Jakarta: Rineka Cipta

- Dayakisni, Tri et.al. 2008, *Psikologi Lintas Budaya*. Malang: UMM Press
- Eriyanto, 2009. *Bagaimana Merancang dan Membuat Survey Opini Publik*, Jakarta: Arori
- Kasali, Rhenald, 1994. *Manajemen Publik Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Graffiti.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi* Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Samovar, Larry et.al. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya (terj.)*. Jakarta: Humanika Salemba.
- Syam, Nur. *Metodologi Penelitian Dakwah: Sketsa Pemikiran Perkembangan Ilmu Dakwah*, Solo: Ranmadhani, 1991